



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Revaluasi Aset Tetap : Sudut Pandang PMK No.191/PMK.010/2015 Dan Relevansi Nilainya

Indah Hapsari¹, Dewi Murdiawati²
Program Studi S1 Akuntansi
STIE Perbanas Surabaya

Abstract. *This study aims to provide empirical evidence regarding the success of PMK No.191/PMK.010/2015 revaluation of fixed assets and also test the value relevance of its accounting information. The research sample is a banking sector company listed on the Indonesia Stock Exchange during 2014-2016. Analytical techniques used to determine the success of PMK No. 191 / PMK.010 / 2015 is McNemar Test, and multiple linear regression tests by emphasizing the explanatory power of the Feltham and Ohlson models to test the value relevance of the accounting information content. Based on the results of McNemar Change Test, it can be concluded that there are differences in method selection of fixed assets at the time before and after the implementation of PMK No.191/PMK.010/2015. Meanwhile, the information presented at fair value have a value relevance of its accounting information.*

Keywords: *Fixed Assets Revaluation; PMK No.191/PMK.010/2015; Value Relevance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keberhasilan PMK No.191/PMK.010/2015 mengenai revaluasi aset, sekaligus menguji relevansi nilai atas informasi akuntansi yang terdapat di dalamnya. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2016. Teknik analisis data yang digunakan untuk melihat keberhasilan PMK No.191/PMK.010/2015 adalah Uji Mc Nemar, dan uji regresi linear berganda dengan penekanan pada Model Feltham dan Ohlson digunakan untuk menilai relevansi informasi akuntansinya. Berdasarkan hasil uji Mc Nemar, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan pemilihan metode pencatatan aset tetap pada saat sebelum dan sesudah pengimplementasian PMK No.191/PMK.010/2015. Sementara itu, informasi yang disajikan berdasarkan nilai wajarnya memiliki kandungan relevansi nilai di dalamnya.

Kata Kunci: PMK No.191/PMK.010/2015; Relevansi Nilai; Revaluasi Aset Tetap.

Corresponding author. Email: indah.hapsari@perbanas.ac.id

How to cite this article. Indah Hapsari, Dewi Murdianti. 2018. Revaluasi Aset Tetap : Sudut Pandang PMK No.191/PMK.010/2015 Dan Relevansi Nilainya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 6(3), 349–360. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670>

History of article. Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i3.4670

Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Perubahan pedoman prinsip akuntansi di Indonesia, yang awalnya berkiblat pada US GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dan saat ini beralih ke IFRS (*International Financial Reporting Standards*), membuat perumusan kebijakan akuntansi untuk lebih mempertimbangkan pada penggunaan nilai wajar. Basis pengukuran dengan nilai wajar ini bertujuan untuk dapat memenuhi kualitas fundamental laporan keuangan, yaitu relevan (Kieso, Weygandt, Warfield, 2014: 41). Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan para stakeholder.

Meski demikian, penerapan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) berbasis IFRS dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Salah satu perkembangan konvergensi IFRS adalah PSAK 16: Aset Tetap, yang diterbitkan pada 2007 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. Berdasarkan PSAK 16 (IAI, 2017), disebutkan bahwa terdapat dua pilihan metode setelah pengakuan awal aset tetap, yakni metode biaya (cost) dan metode revaluasi.

Secara prinsip akuntansi, metode revaluasi menekankan pengukuran aset tetap berdasarkan nilai wajarnya. Setiap terjadinya perbedaan lebih antara nilai wajar dengan nilai tercatat aset, maka dapat diakui sebagai surplus revaluasi. Di lain pihak, secara aspek perpajakan, surplus revaluasi ini merupakan objek pajak penghasilan final, yang secara prinsip fiskal dikenakan setiap 5 tahun sekali, dengan tarif 10%.

Meski demikian, munculnya PMK No.191/PMK.010/2015 yang berlaku sejak Oktober 2015, mengakibatkan adanya penurunan tarif pajak final atas revaluasi, dari 10% menjadi 3% hingga 6%. Tarif 3% berlaku untuk permohonan sampai dengan 31 Desember 2015. Tarif 4% berlaku untuk permohonan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016. Tarif 6%, berlaku

untuk permohonan periode 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Munculnya fasilitas insentif perpajakan ini diharapkan dapat dimanfaatkan, tidak terkecuali bagi perusahaan sektor perbankan, sehingga perusahaan mampu menampilkan informasi akuntansi yang lebih relevan, dan memperkuat kepercayaan pasar.

Bank Mandiri, yang merupakan salah satu perbankan di Indonesia, menggunakan fasilitas ini pada 2015, dan membuat nilai asetnya bertambah hingga Rp 25 triliun, dengan pembayaran pajak atas revaluasi sebesar Rp 693 milyar kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sementara itu, BTN melakukan revaluasi pada 2016, dengan taksiran surplus revaluasi sebesar 2,9 triliun, dimana nilai buku aset tetap sebelum revaluasi adalah Rp 537,558 milyar dan setelah revaluasi meningkat menjadi Rp 3,5 triliun, dengan pembayaran pajak revaluasi mencapai Rp 75 milyar (www.cnnindonesia.com). Penggunaan nilai wajar ini digunakan emiten pada masa pengimplementasian PMK No.191/PMK.010/2015.

Beberapa penelitian terkait revaluasi pernah dilakukan. Berdasarkan penelitian Kurniawati (2013), terdapat 8 dari 405 emiten di BEI (Bursa Efek Indonesia) yang memilih menggunakan metode revaluasi di tahun buku 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa sebanyak 2% emiten telah memilih pengukuran nilai wajar, sementara 98% emiten lainnya tetap berpedoman pada nilai historis. Sementara itu, penelitian Wahyu dan Praptoyo (2014) mengungkapkan bahwa terdapat tiga emiten di sektor manufaktur yang menyajikan surplus revaluasi, dimana dua emiten mengungkapkannya pada 2011-2013, dan satu emiten lainnya baru mengungkapkan surplus revaluasi di 2013. Hal ini mencerminkan bahwa emiten pengguna metode revaluasi aset tetap relatif masih sedikit.

Dalam penelitian lainnya, Tabari dan Adi (2014) serta Manihuruk dan Farahmita (2015) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka kemungkinan

pemilihan metode revaluasi semakin kecil. Latridis (2012) bahkan mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki komposisi aset tetap yang kecil cenderung memilih metode revaluasi dibanding perusahaan dengan komposisi aset tetap yang besar. Hal ini berbeda dengan penelitian Ramadhan dan sherlita (2015) serta Yulistia, dkk (2015) yang mengemukakan bahwa revaluasi aset tidak dipengaruhi dari aset tetap maupun ukuran perusahaan. Kecenderungan perusahaan tidak menggunakan revaluasi aset bahkan memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hikmah (2016) mengutarakan bahwa revaluasi memang menimbulkan biaya-biaya baru, yakni biaya appraisal dan utang pajak penghasilan final.

Selanjutnya, studi terkait relevansi nilai atas kandungan informasi akuntansi, terutama pada masa sebelum dan sesudah IFRS, pernah dilakukan oleh Mironiuc, Carp, dan Chersan (2015), Rahmawati dan Murtini (2015), serta Okafor (2016). Melalui pendekatan Model Feltham dan Ohlson, penelitian-penelitian tersebut menyatakan adanya peningkatan explanatory power dari informasi akuntansi yang diukur berdasarkan nilai wajarnya. Peningkatan ini menandakan bahwa informasi akuntansi yang disajikan telah mengandung relevansi nilai di dalamnya (Naimah, 2014). Hal tersebut juga mengindikasikan pentingnya informasi akuntansi yang relevan, yang diharapkan mampu memberikan sinyal baik, sehingga pasar akan bereaksi positif akibat peran dari suatu informasi yang menunjang pengambilan keputusan.

Berdasarkan fenomena dan kajian penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan PMK No. 191/PMK.010/2015 pada sektor perbankan di BEI, melalui analisis perbedaan pemilihan metode setelah pengakuan awal aset tetap pada saat sebelum dan sesudah periode pengimplementasian PMK No. 191/PMK.010/2015; serta untuk menganalisis relevansi nilai dari kandungan informasi akuntansi pada saat sebelum dan

sesudah periode pengimplementasian PMK No. 191/PMK.010/2015, yaitu selama periode 2014-2016.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan, serta secara praktis menjadi pertimbangan manajemen perusahaan di dalam menekankan penggunaan nilai wajar sebagai pengukuran asetnya, sehingga menampilkan informasi akuntansi yang lebih relevan dan berguna bagi para stakeholder di dalam pengambilan keputusan bisnis.

KAJIAN LITERATUR

Teori sinyal (Scott, 2012) menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor, dimana perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaannya melalui pelaporannya dengan mengirimkan sinyalnya melalui laporan tahunannya. Teori sinyal juga menjelaskan alasan perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal. Teori sinyal juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Teori sinyal juga menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas.

PSAK di Indonesia yang berkiblat pada Internasional Financial Reporting Standard (IFRS), memberikan ruang untuk menggunakan nilai wajar dalam rangka mengukur aset tetap berwujud. Penentuan nilai wajar dapat menggunakan beberapa pendekatan, yang salah satunya adalah pendekatan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai profesional (appraisal).

Metode revaluasi ini juga memunculkan surplus revaluasi yang merupakan objek pajak final, yang secara fiskal dikenakan setiap 5 tahun sekali, dengan tarif 10%, menurut PMK No.79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan. Sejak 15 Oktober 2015, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan bernomor 191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Untuk Tujuan Perpajakan. Berdasarkan PMK No.191/PMK.010/2015, terdapat penurunan tarif pajak final atas revaluasi, dari 10% menjadi 3% hingga 6%. Munculnya fasilitas insentif perpajakan ini adalah terbatas waktu. Setelah periode pemberian fasilitas keringanan pajak ini berakhir, maka tarif pajak akan kembali sebesar 10%. Penggunaan nilai wajar ini diharapkan mampu meningkatkan kandungan informasi akuntansi yang lebih relevan, yang mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, sehingga berguna bagi pengambilan keputusan.

Naimah (2014) memaparkan dalam kajian literturnya bahwa Holthausen dan Watts (2001) mengungkapkan banyaknya penelitian empiris terkait relevansi nilai yang mengaitkan nilai pasar saham dengan angka akuntansi. Studi hubungan relatif membandingkan hubungan antara pasar saham nilai (atau perubahan nilai-nilai) dan angka-angka akuntansi. Studi ini menguji nilai R² yang dihasilkan oleh Regresi atas angka-angka akuntansi tersebut terhadap nilai pasar saham. Angka akuntansi dengan nilai R² yang lebih besar berarti lebih memiliki relevansi nilai dibanding angka akuntansi dengan nilai R² kecil. Model penelitian Ohlson 1995 serta Feltham dan Ohlson 1995 menggunakan studi jenis ini.

Selama ini, perusahaan di Indonesia kerap memilih metode nilai historis atau metode biaya dibandingkan dengan nilai wajar atau metode revaluasi (Kurniawati, 2013; Wahyu dan Praptoyo, 2014). Meski demikian, pada dasarnya pemilihan metode revaluasi berdampak pada penyajian informasi akuntansi yang lebih

mencerminkan kondisi sesungguhnya, yang lebih relevan, dan berguna bagi pengambilan keputusan. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan utama perusahaan sehingga memberi sinyal yang baik bagi pasar.

Akan tetapi, dampak lain digunakannya metode revaluasi adalah munculnya biaya appraisal dan biaya PPh final atas revaluasi (Hikmah, 2016). Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan keringanan fasilitas pajak revaluasi, yang turun dari 10% menjadi 3% hingga 6%. Hal ini seharusnya menjadi fasilitas yang dapat dimanfaatkan perusahaan, termasuk bagi perusahaan di sektor perbankan, untuk beralih metode pencatatan setelah pengakuan awal aset tetap, yang dari metode biaya berubah menjadi metode revaluasi. Dengan demikian, penyajian informasi dengan penggunaan nilai wajar dapat terjadi. H1 : Terdapat perbedaan pemilihan metode pencatatan setelah pengakuan awal aset tetap pada saat sebelum (2014) dan sesudah periode pengimplementasian PMK No. 191/PMK.010/2015 (2015 dan 2016)

Kandungan informasi dari angka-angka akuntansi, terutama dari informasi yang disajikan dengan pengukuran nilai wajar yang menampilkan kualitas suatu pelaporan keuangan yang relevan, seharusnya memiliki relevansi nilai di dalamnya. Ketika informasi yang disampaikan memiliki tingkat korelevansi yang besar, tentu pasar dapat menggunakannya sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, dan memberi sinyal yang baik pada pasar. Beberapa penelitian mengindikasikan adanya relevansi nilai setelah IFRS, seperti yang dinyatakan oleh Mironiuc, Carp, dan Chersan (2015), Rahmawati dan Murtini (2015), serta Okafor (2016).

H2: Terdapat relevansi nilai yang terkandung dalam informasi akuntansi, pada saat sebelum dan sesudah periode pengimplementasian PMK No. 191/PMK.010/2015

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang membutuhkan laporan keuangan tahun 2014-2016 dan data terkait harga saham, yang di peroleh dari situs BEI (www.idx.co.id) dan situs harga saham (www.duniainvestasi.com). Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi.

Sehubungan dengan permasalahan dan hipotesis pertama, maka hanya ada satu variabel yang akan diuji, yakni pemilihan metode pencatatan setelah pengakuan awal aset tetap. Variabel ini diukur dengan skala nominal, dimana dinyatakan 0 apabila perusahaan tetap menggunakan metode biaya, dan 1 apabila perusahaan beralih menggunakan metode revaluasi.

Sehubungan dengan permasalahan dan hipotesis kedua, maka terdapat dua jenis variabel penelitian, yakni variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (Y), berupa harga saham. Harga saham merupakan harga yang muncul akibat permintaan dan penawaran saham di pasar modal, mencerminkan pengorbanan yang dikeluarkan investor terkait penyertaan saham. Harga saham dalam penelitian ini termasuk data dengan skala rasio, yang diukur melalui harga saham penutupan pada akhir April tahun t+1.

Adapun variabel independennya meliputi laba per lembar saham, nilai buku ekuitas per lembar saham, dan pendapatan komprehensif lain per lembar saham.

Laba per lembar saham, menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap didistribusikan kepada investornya. Laba per lembar saham dalam penelitian ini termasuk data dengan skala rasio, yang diukur dengan laba setelah pajak dibagi jumlah lembar saham yang beredar, pada akhir tahun t.

Nilai buku ekuitas per lembar saham, merupakan jumlah yang dibayarkan kepada investornya saat terjadi likuidasi, dimana aset terjual sebesar nilai bukunya. Nilai buku ekuitas per lembar saham dalam penelitian ini termasuk data dengan skala rasio, yang diukur dengan total ekuitas

dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, pada akhir tahun t.

Pendapatan komprehensif lain per lembar saham, diukur dengan besarnya nilai elemen pendapatan komprehensif lainnya, dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, pada akhir tahun t. Data ini termasuk data rasio.

Tahapan teknik analisis data sehubungan dengan permasalahan dan hipotesis yang pertama, maka dilakukan uji beda atas data nominal. Pengujian ini diolah dengan Uji McNemar Change karena data yang diuji berupa data nominal. Uji McNemar Change cocok diaplikasikan untuk desain penelitian “sebelum dan sesudah”, dengan pengukuran variabel menggunakan data skala nominal atau ordinal (Ghozali, 2015: 55). Dalam hal ini, kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis adalah H1 ditolak jika signifikan $\geq 0,05$, dan H1 diterima jika signifikan $< 0,05$.

Tahapan teknik analisis data sehubungan dengan permasalahan dan hipotesis yang kedua, maka dilakukan uji regresi linear berganda atau pengujian pengaruh dua variabel/lebih (Ghozali, 2016: 93-94), dan menarik kesimpulan dengan memperhatikan nilai explanatory power of regression (R²) pada setiap periodenya, selama 2014-2016. Apabila setiap tahun/periode 2014-2016 (pada saat sebelum dan sesudah periode pengimplementasian PMK No. 191/PMK.010/2015) memiliki nilai R² yang semakin besar, maka dianggap memiliki relevansi nilai di dalamnya.

Persamaannya adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{EPS} + \beta_2 \text{BVPS} + \beta_3 \text{OCIPS} + \varepsilon$$

Keterangan: Y (Harga saham); α (Konstanta) ; $\beta_1 - \beta_3$ (Koefisien); EPS (Laba per lembar saham); BVPS (Nilai buku ekuitas per lembar saham); OCIPS (Other Comprehensive Income per lembar saham); ε (error).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna menguji masalah penelitian, dikumpulkan data berupa perusahaan-perusahaan di sektor perbankan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Terdapat tiga puluh sembilan perusahaan perbankan yang menjadi populasi sekaligus sampel di dalam

menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang pertama. Daftar perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Perusahaan Perbankan Sektor BEI

No	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	BBCA	Bank Central Asia, Tbk
2	BBHI	Bank Harda Internasional, Tbk
3	BBKP	Bank Bukopin, Tbk
4	BBMD	Bank Mestika Dharma, Tbk
5	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
6	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan, Tbk
7	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
8	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
9	BBYB	Bank Yudha Bhakti, Tbk
10	BCIC	Bank J Trust Indonesia, Tbk
11	BDMN	Bank Danamon, Tbk
12	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk
13	BGTG	Bank Ganesha, Tbk.
14	BINA	Bank Ina Perdana, Tbk.
15	BJBR	Bank Jabar Banten, Tbk
16	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
17	BKSW	Bank QNB Indonesia, Tbk
18	BMAS	Bank Maspion Indonesia, Tbk
19	BMRI	Bank Mandiri (Persero), Tbk
20	BNBA	Bank Bumi Arta, Tbk
21	BNGA	Bank CIMB Niaga, Tbk
22	BNII	Bank Maybank Indonesia, Tbk
23	BNLI	Bank Permata, Tbk
24	BSIM	Bank Sinar Mas, Tbk
25	BSWD	Bank of India Indonesia, Tbk
26	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
27	BVIC	Bank Victoria International, Tbk
28	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga, Tbk
29	BACA	Bank capital Indonesia, Tbk
30	INPC	Bank Artha Graha International, Tbk
31	MAYA	Bank Mayapada International, Tbk
32	MEGA	Bank Mega, Tbk
33	NISP	Bank OCBC NISP, Tbk
34	PNBN	Bank Pan Indoensia, Tbk
35	BABP	Bank MNC Internasional, Tbk
36	NOBU	Bank National Nobu, Tbk
37	DNAR	Bank Dinar Indonesia, Tbk

38	MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk
39	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

Sumber: www.idx.co.id (2018)

Berdasarkan perusahaan-perusahaan tersebut, terdapat informasi dalam laporan keuangan, termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan, pada bagian Aset Tetap, bahwa beberapa perusahaan telah memilih untuk menggunakan fasilitas PMK No. 191/PMK.010/2015. Perusahaan-perusahaan ini melakukan perubahan metode pencatatan setelah pengakuan awal aset tetap, yakni dari metode cost menjadi metode revaluasi, dengan menggunakan nilai wajar. Meski demikian, hasil analisis konten pada laporan keuangan perusahaan yang memilih perubahan metode, menunjukkan bahwa penerapan revaluasi tidak untuk keseluruhan aset tetap, melainkan hanya sebagian aset tetap saja. Hal ini masih diperkenankan PSAK, apakah revaluasi aset dilaksanakan atas keseluruhan aset tetap atau hanya sebagian aset tetap saja. Hal yang perlu

ditekankan adalah kewajiban untuk melakukan penilaian kembali (revaluasi) secara berkala, setiap periode tahunnya, terutama apabila terdapat perubahan nilai yang cukup signifikan. sementara itu, berdasar pada segi perpajakan, selisih lebih atas revaluasi ini merupakan objek pajak final, namun dengan pengenaannya setiap lima tahun sekali.

Mengingat bahwa fasilitas PMK No. 191/PMK.010/2015 berlaku tarif 3% hingga 6%, maka hipotesis pertama merumuskan bahwa terdapat perbedaan pemilihan metode pencatatan setelah pengakuan awal aset tetap, pada saat sebelum (2014) dan sesudah periode pengimplementasian PMK No. 191/PMK.010/2015 (2015 dan 2016). Berdasarkan Uji Mc Nemar untuk menganalisis hipotesis pertama, didapatkan hasil statistik berikut.

Tabel 2
Uji Mc Nemar 2014-2016

	Sebelum & Sesudah Pengimplementasian PMK
N	39
Exact Sig. (2-tailed)	.000 ^b

Sumber: SPSS, data yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa nilai Exact sig. (2-tailed) menunjukkan angka 0,00 di bawah α 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, atau dengan kata lain terdapat perbedaan pemilihan metode pencatatan setelah pengakuan awal aset tetap, pada saat sebelum (2014) dan sesudah periode pengimplementasian PMK No. 191/PMK.010/2015 (2015 dan 2016).

Secara garis besar, selama seluruh rentang periode 2014 hingga 2016, dari tiga puluh sembilan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan yang tetap memilih menggunakan metode

cost (dummy=0) adalah 11 perusahaan; perusahaan yang dari sebelum fasilitas PMK telah menggunakan metode revaluasi (dummy=1) adalah 4 perusahaan; sedangkan perusahaan yang memilih untuk beralih menggunakan metode revaluasi atau dalam hal ini memilih penggunaan nilai wajar untuk aset tetapnya (dummy=1) adalah sebanyak 24 perusahaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, perusahaan di sektor perbankan memiliki ketertarikan untuk menyuguhkan aset tetapnya berdasarkan nilai wajar, dalam periode dimana dapat menggunakan fasilitas PMK No.

191/PMK.010/2015. Sebanyak 24 perusahaan atau 69% perbankan yang turut serta dalam penggunaan fasilitas PMK ini, menunjukkan adanya indikasi keberhasilan PMK No. 191/PMK.010/2015. PMK ini pada dasarnya memacu perusahaan untuk menggunakan nilai wajar pada aset tetapnya, dengan memilih metode revaluasi, dengan tarif pajak atas selisih lebih penilaian kembalinya pada tarif yang lebih rendah dibanding tarif 10%. PMK ini juga merupakan upaya pemerintah untuk

mendorong perusahaan dalam menampilkan laporan keuangan yang lebih relevan, yang menekankan penggunaan nilai wajarnya, sehingga berkontribusi dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih relevan.

Mengingat bahwa PMK ini terbagi menjadi beberapa periode, maka berikut ini merupakan detail perubahan penggunaan metode aset tetap, berdasarkan kajian tiap tahun, yakni 2014 dengan 2015, dan 2015 dengan 2016.

Tabel 3
Uji Mc Nemar 2014 dan 2015

Periode 2014 dan 2015	
N	39
Exact Sig. (2-tailed)	.000 ^b

Sumber: SPSS, data yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa nilai Exact sig. (2-tailed) menunjukkan angka 0,00 di bawah α 5%. Berdasarkan statistik, dari tiga puluh sembilan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia, maka pada periode 2014 menuju 2015, perusahaan yang tetap memilih menggunakan metode cost (dummy=0) adalah 20 perusahaan; perusahaan yang dari sebelum fasilitas PMK telah dari awal menggunakan metode revaluasi (dummy=1) adalah 4 perusahaan; sementara perusahaan yang memilih untuk beralih menggunakan metode revaluasi atau dalam hal ini memilih penggunaan nilai wajar untuk aset tetapnya (dummy=1) adalah sebanyak 15 perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa, sebanyak 15 perusahaan atau 43% perbankan di Bursa Efek Indonesia, beralih metode dari cost menjadi revaluasi, dengan memanfaatkan tarif pajak revaluasi terkecil pada periode pertama, yakni 3%. Banyaknya perusahaan yang turut serta dalam penggunaan fasilitas PMK ini, mengindikasikan adanya preferensi perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas tarif pajak revaluasi terendah dalam PMK No. 191/PMK.010/2015, sekaligus upaya dalam menyampaikan laporan keuangan, terutama aset tetapnya, pada tataran nilai wajarnya, sehingga lebih relevan.

Tabel 4
Uji Mc Nemar 2015 dan 2016

Periode 2015 dan 2016	
N	39
Exact Sig. (2-tailed)	.004 ^b

Sumber: SPSS, data yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa nilai Exact sig. (2-tailed) menunjukkan angka 0,004 di bawah α 5%. Pada

berlangsungnya periode 2015 hingga 2016, perusahaan yang tetap memilih menggunakan metode cost (dummy=0)

adalah berkurang menjadi 11 perusahaan dari periode sebelumnya; perusahaan yang telah menggunakan metode revaluasi dari periode sebelumnya (dummy=1) adalah 19 perusahaan (bertambah dikarenakan telah ada 15 perusahaan yang memilih revaluasi pada periode 2015); dan perusahaan yang baru memilih untuk beralih menggunakan metode revaluasi atau dalam hal ini memilih penggunaan nilai wajar untuk aset tetapnya (dummy=1) adalah sebanyak 9 perusahaan.

Hal ini menunjukkan, sebanyak 9 perusahaan atau 26% perbankan di Bursa Efek Indonesia, beralih metode dari cost menjadi revaluasi. Besaran perusahaan yang memilih penggunaan revaluasi periode ini turun sebanyak 17% dari periode sebelumnya. Kemungkinan menurunnya prosentasi ini adalah kecenderungan perusahaan yang memanfaatkan fasilitas PMK ini masih mendapatkan keringanan tarif walaupun dengan nilai yang sedikit lebih tinggi, yakni 4%. Meski demikian, antusiasme perusahaan dalam memanfaatkan tarif pajak revaluasi masih terlihat. Adanya perusahaan pada periode

berlangsungnya fasilitas PMK ini, mengindikasikan preferensi perusahaan untuk turut serta dalam memanfaatkan fasilitas tarif pajak revaluasi PMK No. 191/PMK.010/2015, sekaligus upaya dalam menyampaikan laporan keuangan, terutama aset tetapnya, pada tataran nilai wajarnya, sehingga lebih relevan.

Selanjutnya, guna menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang kedua, maka dilakukan teknik analisis regresi linear berganda, pada perusahaan-perusahaan yang beralih metode dari cost kepada metode revaluasi. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, explanatory power atau nilai Adjusted R² dalam penelitian ini mengukur relevansi nilai informasi akuntansi yang diperoleh dari regresi antara laba per lembar saham, nilai buku ekuitas per lembar saham, dan pendapatan komprehensif lain per lembar saham dengan harga saham. Berikut adalah hasil uji Adjusted R² pada periode sebelum dan sesudah pengimplementasian PMK No. 191/PMK.010/2015, yakni untuk 2014 dan 2015.

Tabel 5
Hasil Statistik Regresi Periode 2014 dan 2015

Keterangan	Periode2014 (Sebelum PMK)	Periode 2015 (Saat berlangsung PMK)
Sig. F	0,000	0,000
Uji Normalitas Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200	0,121
Adjusted R²	0,976	0,962

Sumber: SPSS, data yang diolah (2018)

Pada Tabel 5, nilai Asymp.sig. (2-tailed) hasil uji normalitas periode 2014 dan 2015 secara berturut-turut adalah 0,200 dan 0.121. Hal ini menunjukkan bahwa residual data pada kedua periode tersebut telah terdistribusi secara normal, dan asumsi normalitas telah terpenuhi. Selanjutnya, dapat diketahui pula bahwa nilai Sig.F pada kedua model regresi periode 2014 dan 2015 sebesar 0.000 di bawah α 5%. Hal ini berarti model tergolong fit, dan penarikan kesimpulan atas model dapat dilanjutkan.

Selanjutnya, nilai adjusted R² yang meningkat secara signifikan dapat dikatakan informasi akuntansi meningkat relevansi nilainya karena penggunaan nilai wajar. Sementara itu, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R² pada periode 2014 (sebelum PMK) sebesar 0,976, sedangkan nilai adjusted R² pada periode 2015 (setelah PMK) sebesar 0,962. Nilai adjusted R² pada periode 2014 (sebelum PMK) sampai dengan periode 2015 (saat berlangsung PMK) hasilnya menurun,

meski demikian sifatnya terlampau sangat kecil yaitu 0,0014. Beberapa penelitian pernah mengungkapkan bahwa adopsi IFRS dapat pula menyebabkan relevansi nilai menurun (Cahyonowati dan Ratmono, 2012; Barth dkk. 2007), yang dapat terjadi karena lingkungan institusional, seperti perlindungan investor yang masih lemah, dan kurangnya penegakan hukum serta pendanaan yang berorientasi pada perbankan yang masih belum mendukung. Akan tetapi, nilai adjusted R² pada penelitian ini sebenarnya masih dalam taraf yang tinggi, yakni 0,976 dan 0,962, sehingga kandungan informasi akuntansi masih dapat dikatakan relatif relevan. Penggunaan nilai wajar memang diharapkan mampu menunjang penyajian informasi keuangan yang lebih relevan, yang lebih mencerminkan dan menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga berguna bagi pengambilan keputusan.

Tabel 6
Hasil Statistik Regresi Periode 2015 dan 2016

Variabel	Periode 2015	Periode 2016
Sig. F	0,003	0,001
Uji Normalitas Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200	0,200
Adjusted R²	0,874	0,925

Sumber: SPSS, data yang diolah (2018)

Pada Tabel 6, nilai Asymp.sig. (2-tailed) hasil uji normalitas periode 2015 dan 2016 adalah 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa residual data pada kedua periode tersebut telah terdistribusi secara normal, dan asumsi normalitas telah terpenuhi. Selanjutnya, dapat diketahui pula bahwa nilai Sig.F pada kedua model regresi periode 2015 dan 2016 secara berturut-turut adalah 0.00 dan 0.001, dimana keduanya berada di bawah α 5%. Hal ini berarti model tergolong fit, dan penarikan kesimpulan atas model dapat dilanjutkan.

Selanjutnya, nilai adjusted R² pada periode 2015 sampai dengan periode 2016 hasilnya meningkat cukup signifikan, yaitu 0,874 menjadi 0,925. Hal ini cenderung mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan relevansi nilai yang terkandung dalam informasi akuntansi, terutama masa penggunaan nilai wajar, dimana perusahaan memilih metode revaluasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Mironiuc, Carp, dan Chersan (2015), Rahmawati dan Murtini (2015), serta Okafor (2016) yang menjelaskan

bahwa terdapat peningkatan nilai R^2 paska adopsi IFRS, yang mana lebih menekankan pada penggunaan nilai wajar, serta terdapat relevansi nilai dalam kandungan informasi angka-angka akuntansi. Laporan keuangan yang disajikan dengan nilai wajar diharapkan mampu membuat laporan keuangan menjadi lebih relevan, lebih mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, dan dapat menunjang pengambilan keputusan, terutama bagi para penyedia dana, seperti investor.

Berdasarkan kajian-kajian hasil statistik periode 2014-2015 dan 2015-2016, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima. Dengan demikian, terdapat relevansi nilai yang terkandung dalam informasi akuntansi, pada saat sebelum dan sesudah periode pengimplementasian PMK No. 191/PMK.010/2015.

SIMPULAN

Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, banyak menggunakan fasilitas perpajakan, yaitu PMK No. 191/PMK.010/2015, dimana terdapat fasilitas keringanan dari tarif pajak revaluasi di bawah 10%. Hal ini memberi implikasi yang baik, karena fasilitas ini dapat dikatakan berhasil untuk mendorong perusahaan supaya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan cerminan nilai wajarnya. Selain itu, terdapat indikasi adanya relevansi nilai dalam kandungan angka-angka akuntansi, terutama bagi perusahaan yang lebih memilih penggunaan revaluasi aset tetapnya. Hal ini menandakan bahwa informasi akuntansi memiliki tingkat korelevansi yang besar, dan pasar dapat menggunakannya sebagai pertimbangan pengambilan keputusan sekaligus memberi sinyal yang baik pada pasar.

Penelitian ini masih terbatas pada pengimplementasian PMK hingga tahun 2016. Bagi penelitian selanjutnya, dapat meneliti kembali efek dari PMK No. 191/PMK.010/2015, dilihat dari sudut pandang yang berbeda, seperti tax book difference, atau keuntungan dari penggunaan revaluasi berdasar cash flow atau nilai perusahaan, sehingga terdapat bukti empiris

lainnya terkait kelebihan penggunaan nilai wajar dalam penyajian laporan keuangan, yang lebih relevan bagi pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ghozali, I. (2015). *Statistik NonParametrik : Teori dan Aplikasi dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 2)*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- , 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2017). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, D.E., Jerry J.W., & Terry D.W. (2014). *Intermediate Accounting IFRS Edition (Second Edition)*. Riverstreet, Hoboken, USA : Wiley (John Wiley & Sons, Inc).
- Scott, W. R. (2012). *Financial Accounting Theory 6th Edition*. Toronto: Pearson Education Canada.

Jurnal

- Hikmah, N. (2016). Implikasi Penerapan PMK191/No.010/2015 Terhadap Pelaksanaan Revaluasi Aset Tetap: Studi Kasus PT Pembangkit Jawa Bali. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. 4(2).
- Isa, M.A.. (2014). Determinants of accounting choice of noncurrent assets at IFRS first adoption among Nigerian firms. *International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014*, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 164, 378 – 383. Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.11.091.
- Kurniawati, H. (2013). Analisis dan Tren Penggunaan Accounting Choice yang Dilakukan Perusahaan Paska Adopsi IFRS. *Binus Business Review*. 4(2), 765-775.

- Latridis, G.E. (2012). Incentives for fixed asset revaluations: the UK Evidence. *Journal of Applied Accounting Research*. 13 (1), 5 – 20, Doi 10.1108/09675421211231871
- Lopes, A.B., & Martin, W. (2012). Asset revaluations, future firm performance and firm-level corporate governance arrangements: New evidence from Brazil. *The British Accounting Review*. 44, 53–67.
- Manihuruk, T.N.H., & Aria.F. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Revaluasi Aset Tetap pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Saham Beberapa Negara ASEAN. *Simposium Nasional Akuntansi 18*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 16-19 September 2015.
- Mironiuc, M., Mihai, C., & Ionela,C.C. (2015). The relevance of financial reporting on the performance of quoted Romanian companies in the context of adopting the IFRS. *7th International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, GEBA 2013. Procedia Economics and Finance*. 20, 404 – 413. Doi: 10.1016/S2212-5671(15)00090-8.
- Naimah, Z. (2014). Relevansi Nilai Informasi Akuntansi: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 19(1), 105-117.
- Okafor, O.N. (2016). IFRS and value relevance: evidence based on Canadian Adoption. *International Journal of Managerial Finance*. 12 (2), <http://dx.doi.org/10.1108/IJMF-02-2015-0033>
- Rahmawati, L, & Henny M. (2015). Kualitas Informasi Akuntansi Pra dan Pasca Adopsi IFRS. *Accounting Analysis Journal*. 4(2), 1-9, ISSN 2252-6765.
- Ramadhan, M.A., & Erly, S. (2015). Pengaruh Negosiasi Debt Contracts terhadap Perusahaan Untuk Melakukan Revaluasi Aset Tetap. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Ekonomi*. 1(1), 113-126.
- Tabari, N.Y., & Marzieh, A. (2014). Factors Affecting the Decision to Revaluation of Assets in Listed Companies of Tehran Stock Exchange (TSE). *International Journal of Scientific Management and Development*. 2(8), 373-377, August (2014). ISSN:2345-3974.
- Wahyu, R.P.S., & Sugeng, P. (2014). Penyajian dan Komponen Other Comprehensive Income. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. 3(12), 1-16.
- Yulistia, R., dkk. (2015). Pengaruh Leverage, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan, dan Fixed Asset Intensity Terhadap Revaluasi Aset Tetap. *Simposium Nasional Akuntansi 18*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 16-19 September 2015.

Sumber lainnya

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
- www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160908151600-78-157048/bank-bumn-diuntungkan-diskon-pajak-revaluasi-aset-paket-v/
- www.duniainvestasi.com
- www.idx.co